



Pembentukan Provinsi Tangerang Raya: Telaah Empiris atas Potensi dan Kesiapan Ekonomi Wilayah

Tubagus Arya Abdurachman^{1*}, I Ketut Wenten¹, Jimmy Paulino Ginting Putra¹,
Maman Darmansyah¹

1. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Corresponding author: Tubagus Arya Abdurachman: dosen01872@unpam.ac.id

Abdurachman, T. A., Wenten, I. K., Putra, J. P. G., & Darmansyah, M. (2026). Pembentukan Provinsi Tangerang Raya: Telaah Empiris atas Potensi dan Kesiapan Ekonomi Wilayah. *Warmadewa Economic Development Journal*, 9(2), 145-160. doi:<https://doi.org/10.22225/wedj.9.2.2026.145-160>

Abstract. *The establishment of New Autonomous Regions (DOB) is a strategic instrument of decentralization aimed at promoting equitable development and improving welfare. However, its success is largely determined by the economic readiness of the region concerned. Although studies on new autonomous regions have developed rapidly, most studies focus more on aggregate administrative and fiscal aspects, while empirical analysis based on sectoral structures capable of proving the economic viability of a prospective province is still very limited. This study aims to identify basic and superior sectors and evaluate the economic viability of the prospective Greater Tangerang Province region consisting of Tangerang Regency, Tangerang City, and South Tangerang City. The method used is Location Quotient (LQ) analysis and sectoral Klassen Typology, with Gross Regional Domestic Product (GRDP) data at constant prices in 2010 for the period 2014-2024 sourced from the Central Statistics Agency, using Banten Province as the reference region. The results of the LQ analysis indicate that the three regions have unique and complementary sectoral specializations: Tangerang Regency excels in the industrial, energy, and financial sectors; Tangerang City in transportation and logistics; and South Tangerang City in knowledge-based modern services with nine basic sectors. In aggregate, the Klassen Typology analysis places 10 of the 17 sectors in Quadrant I (developed and rapidly growing), with none in Quadrant II—a superior profile not possessed by any individual region. This finding provides empirical legitimacy that Greater Tangerang Province has a strong, diversified economic foundation, worthy of standing as a new, fiscally independent and sustainable autonomous region.*

Keywords: *LQ; klassen typology; DOB; Tangerang Raya*

Abstrak. Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan instrumen strategis desentralisasi yang bertujuan mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Meskipun kajian mengenai DOB telah berkembang pesat, sebagian besar studi lebih berfokus pada aspek administratif dan fiskal secara agregat, sementara analisis empiris berbasis struktur sektoral yang mampu membuktikan kelayakan ekonomi suatu calon provinsi masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sektor-sektor basis dan unggulan serta mengevaluasi kelayakan ekonomi wilayah calon Provinsi Tangerang Raya yang terdiri atas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ) dan Tipologi Klassen sektoral, dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 periode 2014-2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, menggunakan Provinsi Banten sebagai wilayah referensi. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa ketiga wilayah memiliki spesialisasi sektoral yang khas dan saling komplementer: Kabupaten Tangerang unggul pada sektor industri, energi, dan keuangan; Kota Tangerang pada transportasi dan logistik; serta Kota Tangerang Selatan pada jasa modern berbasis pengetahuan dengan sembilan sektor basis. Secara agregat, analisis

Tipologi Klassen menempatkan 10 dari 17 sektor pada Kuadran I (maju dan tumbuh pesat) tanpa satu pun sektor yang masuk Kuadran II, sebuah profil unggul yang tidak dimiliki oleh masing-masing daerah secara individual. Temuan ini memberikan legitimasi empiris bahwa Provinsi Tangerang Raya memiliki fondasi ekonomi yang kuat, terdiversifikasi, dan layak untuk berdiri sebagai daerah otonom baru yang mandiri secara fiskal dan berkelanjutan.

Kata kunci: LQ; tipology klassen; DOB; Tangerang Raya

1. PENDAHULUAN

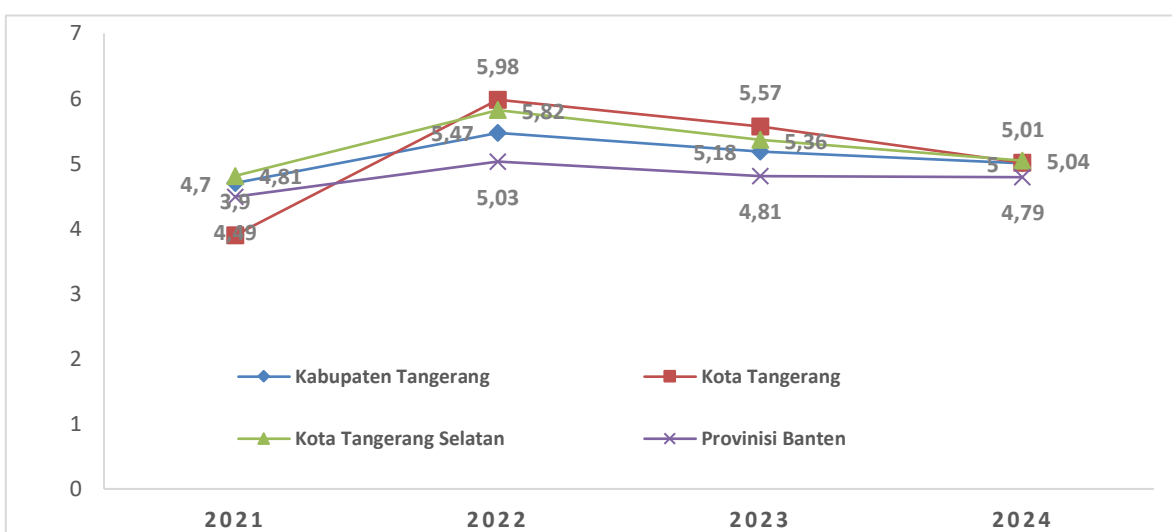
Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi yang memungkinkan daerah untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat (Meliala, 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendasari kewenangan yang lebih luas di tangan pemerintah daerah (Natsir, 2025), namun kewenangan tanpa basis ekonomi yang memadai hanya akan melahirkan ketergantungan fiskal baru terhadap transfer pusat. Dinamika pembentukan DOB di Indonesia di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang belum mandiri secara fiskal dan tetap bergantung pada dana transfer pusat, sehingga pemerintah menerapkan moratorium sebagai bentuk diskresi untuk mengendalikan laju pemekaran dan memastikan kesiapan daerah (Rizkika et al., 2023). Kajian mengenai DOB tetap relevan untuk terus dikembangkan. Hal ini mengingat bahwa aspirasi pemekaran daerah tidak serta-merta padam di tengah kebijakan moratorium, melainkan terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan, efektivitas pelayanan publik, dan penguatan identitas lokal yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam struktur daerah yang ada.

Pada hakikatnya pembentukan DOB memiliki tujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, terutama di wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar namun belum terkelola optimal (Widodo et al., 2024), (Santi & Iskandar, 2021). Keberhasilan pembentukan daerah otonom baru tidak hanya ditentukan oleh aspek administratif dan kelembagaan, tetapi juga oleh kemampuan ekonomi daerah dalam menopang keberlanjutan fiskal dan pembangunan jangka panjang. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat akan lebih mampu menyediakan pelayanan publik, membiayai infrastruktur, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Irasriadipura et al., 2023).

Gap penelitian ini terletak pada belum tersedianya kajian empiris yang menilai potensi dan kesiapan ekonomi suatu wilayah pada tahap perencanaan pembentukan DOB, mengingat sebagian besar studi terdahulu baik yang menunjukkan dampak positif desentralisasi fiskal (Dinarjito & Dharmazi, 2020; Ciptawaty, 2019) maupun yang menunjukkan hasil sebaliknya (Widiprana, 2022; Supriyo & others, 2021) bersifat mengevaluasi dampak setelah daerah otonom baru terbentuk, bukan menilai kelayakan ekonomi wilayah sebelum keputusan pemekaran diambil. Sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan moratorium DOB (Rizkika et al., 2023), kesiapan ekonomi dan fiskal daerah seharusnya menjadi basis pertimbangan utama sebelum pembentukan dilakukan. Lebih lanjut, sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang secara spesifik menelaah potensi dan daya saing ekonomi wilayah calon Provinsi Tangerang Raya, padahal wacana pemekaran wilayah ini telah berlangsung cukup lama dan memiliki karakteristik struktur ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa di kawasan aglomerasi Jabodetabek yang berbeda dari kasus-kasus DOB yang umumnya menjadi objek studi terdahulu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan sebagai indikator yang merepresentasikan kapasitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal calon daerah otonom baru. PDRB tidak hanya mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa suatu wilayah, tetapi juga menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan

memperluas basis pajak lokal. Analisis terhadap pertumbuhan dan struktur PDRB menjadi penting untuk menilai apakah suatu wilayah memiliki ketahanan ekonomi yang cukup untuk berdiri sebagai provinsi baru. Menurut TVRINews, (Lidya Thalia.S, 2025) wacana pembentukan Provinsi Tangerang Raya menjadi isu yang semakin relevan seiring menguatnya dorongan pemekaran wilayah di Provinsi Banten. Dnews (2025) mencatat bahwa secara geografis, wilayah Tangerang Raya direncanakan terdiri dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, yang saat ini masih menjadi bagian dari Provinsi Banten. Secara ekonomi, ketiga wilayah ini merupakan pusat aktivitas utama di barat Jakarta dan menjadi simpul pertumbuhan paling dinamis di Provinsi Banten. Pembentukan Provinsi Tangerang Raya berpotensi besar karena wilayah ini telah memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang kuat, basis industri dan jasa yang mapan, serta infrastruktur modern yang relatif lengkap. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa performa ekonomi di wilayah calon Tangerang Raya terus menunjukkan tren positif yang stabil selama beberapa tahun belakangan.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Wilayah Calon Provinsi Tangerang Raya dan Provinsi Banten Tahun 2021-2024 (Atas Harga Konstan 2010 Dalam Persentase)
(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025, diolah)

Gambar 1 menyajikan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi wilayah calon Provinsi Tangerang Raya dengan Provinsi Banten selama periode 2021-2024. Ketiga wilayah menunjukkan pertumbuhan yang dinamis dan kompetitif dibandingkan provinsi Banten. Pada tahun 2021, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan masing-masing tumbuh sebesar 4,70 persen dan 4,81 persen, keduanya melampaui laju pertumbuhan Provinsi Banten yang berada pada angka 4,49 persen. Sementara itu, Kota Tangerang mencatat pertumbuhan sebesar 3,90 persen pada tahun yang sama, sedikit di bawah Provinsi Banten. Momentum pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022, di mana seluruh wilayah calon Provinsi Tangerang Raya mencapai puncak akselerasi secara bersamaan. Kota Tangerang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,98 persen, diikuti Kota Tangerang Selatan sebesar 5,82 persen, dan Kabupaten Tangerang sebesar 5,47 persen. Ketiganya secara signifikan melampaui pertumbuhan Provinsi Banten yang tercatat sebesar 5,03 persen pada periode yang sama. Fenomena ini mencerminkan kuatnya daya pemulihan ekonomi wilayah calon provinsi Tangerang Raya pasca pandemi, yang ditopang oleh basis industri pengolahan, perdagangan, serta sektor jasa yang relatif beragam dan tangguh.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, seluruh wilayah mengalami normalisasi pertumbuhan seiring dengan perlambatan ekonomi global dan konsolidasi fiskal pascapemulihan. Meskipun demikian, ketiga wilayah secara konsisten masih tumbuh di atas laju Provinsi Banten yang tercatat sebesar 4,81 persen pada 2023 dan 4,79 persen pada 2024. Kota

Tangerang Selatan memimpin dengan pertumbuhan 5,36 persen pada 2023, diikuti Kota Tangerang 5,57 persen dan Kabupaten Tangerang 5,18 persen. Penelitian mengenai pembentukan Provinsi Tangerang Raya menjadi sangat penting mengingat wilayah ini telah berkembang sebagai salah satu pusat ekonomi paling dinamis di Indonesia bagian barat. Dengan kontribusi PDRB yang signifikan terhadap Provinsi Banten, serta struktur ekonomi yang ditopang oleh sektor industri, jasa, dan perdagangan modern, Tangerang Raya memiliki potensi riil untuk menjadi daerah otonom yang mandiri secara fiskal dan administratif. Namun, potensi tersebut perlu dibuktikan secara empiris melalui kajian ilmiah yang komprehensif agar pembentukan provinsi tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan politis, tetapi juga pada dasar ekonomi yang kuat. Penelitian ini difokuskan pada dua persoalan utama. Pertama, mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dan unggulan di wilayah calon Provinsi Tangerang Raya. Kedua, mengukur sejauh mana daya saing dan kontribusi ekonomi sektoral tersebut dapat menjadi dasar kelayakan pembentukan Provinsi Tangerang Raya sebagai daerah otonom baru yang mandiri dan berkelanjutan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Otonomi Daerah dan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)

Otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berfungsi sebagai alat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan. Otonomi ini memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah (Fartini, 2022). Dalam implementasinya, otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali potensi lokal dan mengelola sumber daya alam secara mandiri demi mencapai pembangunan berkelanjutan (Sholikin, 2018). Pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal ini menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya secara mandiri, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manajemen pengeluaran yang efisien (Syam & Zulfikar, 2022). Otonomi daerah sering menghadapi kendala dalam pengawasan dan transparansi, yang dapat mengarah pada praktik korupsi dan ketidakakuratan dalam pengelolaan anggaran (Prohansah & Eprilianto, 2022). Sistem pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya daerah digunakan secara efisien dan bertanggung jawab (Haryanto, 2017). Penguatan akuntabilitas pemerintah daerah adalah langkah penting untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Yudia et al., 2024).

Tujuan Pembentukan DOB

Pembentukan DOB juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memberikan otonomi yang lebih besar, pemerintah berharap dapat mendorong investasi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah baru tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah, jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Aminah et al., 2021). Selain itu, DOB juga dipandang sebagai cara untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian sumber daya dan kekuasaan. Dalam konteks ini, pengakuan atas aspirasi lokal menjadi penting. Masyarakat di daerah baru sering kali merasa tidak terlayani oleh pemerintah pusat, dan DOB dapat menjadi solusi untuk memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri (Permatasari et al., 2023; Wisesa et al., 2023). Misalnya, keberadaan DOB dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal yang terkadang terabaikan dalam skema pemerintah pusat yang lebih besar (Aminah et al., 2021). Kendati

demikian, pembentukan DOB tidak tanpa tantangan. Ada potensi munculnya konflik terkait batas wilayah, pengelolaan sumber daya, dan distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah (Tinanto et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menangani isu-isu tersebut secara hati-hati melalui dialog dan partisipasi publik yang konstruktif (Tang et al., 2014).

Pertumbuhan Ekonomi Regional: Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) Dan Teori Non-Basis

Pertumbuhan ekonomi regional adalah fenomena kompleks yang mencakup peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah secara berkelanjutan. Salah satu kerangka teoritis yang banyak digunakan untuk menjelaskan dinamika pertumbuhan ini adalah Teori Basis Ekonomi, yang menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang berbasis pada ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut teori ini, kegiatan ekonomi eksternal berfungsi sebagai sumber utama arus masuk pendapatan yang memungkinkan daerah untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rutland & O'Hagan, 2007), (Nishiyama, 1997). Kritik terhadap Teori Basis Ekonomi datang dari penelitian yang menunjukkan bahwa, meskipun ekspor berperan penting, faktor-faktor endogen seperti inovasi dan investasi dalam modal manusia juga merupakan komponen krusial dalam pengembangan ekonomi regional. Mathur, dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa strategi berbasis sumber daya manusia bisa menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Mathur, 1999). Begitu pula, penelitian oleh Nijkamp dan Abreu menekankan pentingnya pendekatan endogen dalam memahami bagaimana interaksi antara ekonomi lokal dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi pertumbuhan (Nijkamp & Abreu, 2009).

Peran PDRB Sebagai Indikator Utama Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makroekonomi yang fundamental dalam mengevaluasi kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebagai ukuran total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di wilayah tertentu, PDRB mencakup kontribusi dari sektor pertanian, industri, dan jasa. Sebagai contoh, penelitian oleh Mulyasari menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah antara tahun 2010-2014 (Mulyasari, 2018). Pemahaman yang tepat tentang dinamika PDRB juga penting dalam menangani isu-isu sosial ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Sebagai bukti, Leonita dan Sari menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara laju PDRB, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia (Leonita & Sari, 2019).

PDRB memiliki hubungan yang kuat dengan aspek kebijakan ekonomi regional. Penghitungan PDRB membantu dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Penelitian oleh Mashita dan Anggresta menegaskan bahwa PDRB memberikan petunjuk bagi kebijakan publik dalam konteks inflasi, tenaga kerja, dan nilai produksi yang berdampak pada perkembangan ekonomi (Mashita & Anggresta, 2022). PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator yang esensial dalam menggambarkan struktur ekonomi suatu daerah. Penyelidikan terhadap komposisi sektoral di dalam PDRB tidak hanya mencerminkan ukuran produksi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dinamika berbagai segmentasi ekonomi yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah. Hal ini memberikan wawasan berharga untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor yang masih tertinggal. Misalnya, pertumbuhan yang signifikan dalam sektor industri pengolahan dapat menunjukkan adanya transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih maju dan berdaya saing (Vikaliana, 2018). Sebaliknya, dominasi sektor primer yang stagnan dapat mengindikasikan ketergantungan pada sumber

daya alam yang tidak berkelanjutan serta menunjukkan tingkat produktivitas yang buruk dalam sektor-sektor tersebut (Amir & Nazara, 2005).

State of the Art

Penelitian terdahulu mengenai DOB umumnya berfokus pada evaluasi dampak desentralisasi fiskal setelah daerah otonom baru terbentuk, dengan hasil yang masih beragam antara yang menunjukkan dampak positif (Dinarjito & Dharmazi, 2020; Ciptawaty, 2019) maupun yang menunjukkan hasil sebaliknya (Widiprana, 2022; Supriyo & others, 2021), sementara kajian yang mengintegrasikan analisis Location Quotient dan Tipologi Klassen untuk menilai kelayakan ekonomi pada tahap perencanaan pembentukan DOB di wilayah aglomerasi metropolitan masih belum ditemukan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis sektoral berbasis PDRB pada calon Provinsi Tangerang Raya, sebuah lokus yang berbeda secara struktural dari studi-studi DOB sebelumnya.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan kombinasi analisis sektoral dan ekonometrika. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan struktur dan daya saing ekonomi calon Provinsi Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan). Analisis dilakukan melalui :1). Analisis Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis, 2). Analisis Tipologi Klassen untuk mengelompokkan pola pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, terutama publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Data yang digunakan meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 selama periode 2014-2024. Meskipun secara ideal share (si, s) lebih tepat dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk mencerminkan kontribusi nilai ekonomi aktual, sementara variabel pertumbuhan (ski, sk) menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk mengeliminasi distorsi inflasi, penelitian ini menggunakan satu basis data yang seragam yaitu ADHK 2010 mengikuti ketersediaan data yang konsisten dan pendekatan yang lazim digunakan dalam studi tipologi sektoral di Indonesia. Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif (sektor basis) dan sektor yang belum berkembang (non-basis) (Sausan et al., 2022). Rumus LQ dinyatakan sebagai berikut:

$$LQ = (Yi_r / Yr) / (Yi_n / Yn)$$

Dimana:

Yi_r = Nilai tambah sektor i di daerah

Yr = Total PDRB daerah r

Yi_n = Nilai tambah sektor i di tingkat provinsi atau nasional

Yn = Total PDRB provinsi atau nasional

Interpretasi hasil:

$LQ > 1$ = sektor basis (unggulan)

$LQ = 1$ = sektor cukup potensial

$LQ < 1$ = sektor belum menjadi basis

Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengelompokkan wilayah atau sektor ekonomi berdasarkan kinerja pertumbuhan ekonomi (growth rate) dan kontribusi terhadap total PDRB (share). Metode ini memudahkan untuk mengidentifikasi posisi relatif daerah atau sektor dalam peta pembangunan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing

daerah atau sektor:

Tabel 1. Klasifikasi sektor PDRB menurut Analisis Tipologi Klassen

Kuadran I	Kuadran II
Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sektor) $si > s$ dan $ski > sk$	Sektor maju tapi tertekan (stagnan sektor) $si \geq s$ dan $ski < sk$
Kuadran III	Kuadran IV
Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sektor) $si < s$ dan $ski \geq sk$	Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sektor) $si < s$ dan $ski < sk$

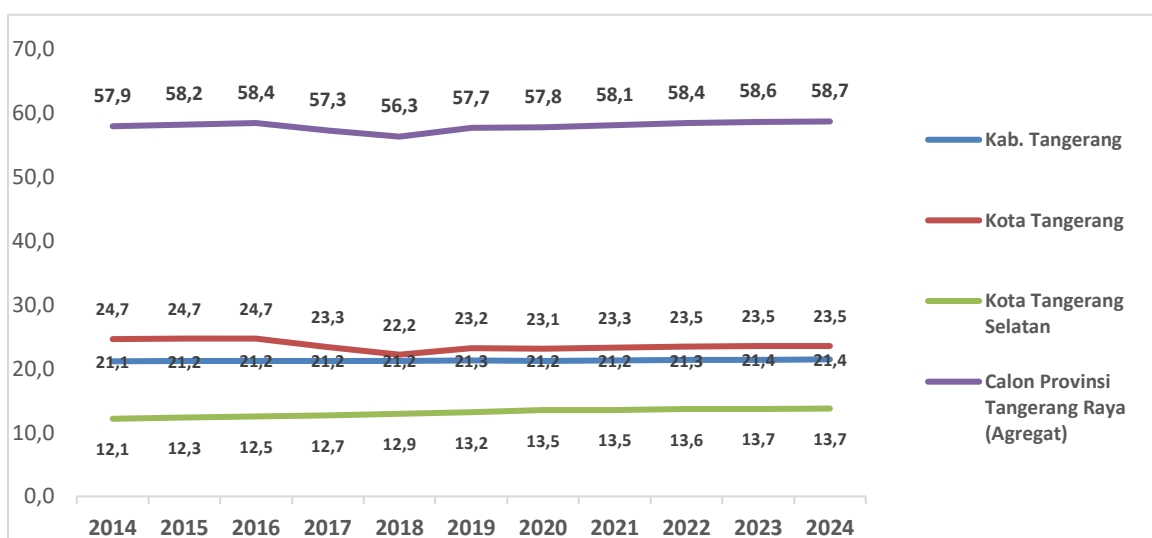
Sumber: (Faisal et al., 2023)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi PDRB Calon Provinsi Tangerang Raya terhadap PDRB Provinsi Banten

Wilayah calon Provinsi Tangerang Raya yang terdiri atas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menunjukkan kontribusi dominan terhadap perekonomian Provinsi Banten selama periode 2014-2024 sebagaimana bias dilihat pada gambar 2. Secara agregat, ketiga wilayah ini menyumbang rata-rata sebesar 57,9 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Banten. Angka ini mencerminkan bahwa lebih dari separuh aktivitas ekonomi Provinsi Banten sesungguhnya bertumpu pada kawasan Tangerang Raya, menjadikannya sebagai pusat gravitasi ekonomi yang tidak dapat diabaikan dalam peta pembangunan regional. Kota Tangerang tampil sebagai kontributor terbesar dengan rata-rata kontribusi mencapai 23,6 persen, diikuti oleh Kabupaten Tangerang sebesar 21,3 persen. Tingginya kontribusi kedua wilayah ini tidak terlepas dari keberadaan kawasan industri pengolahan berskala besar, infrastruktur transportasi yang strategis, serta aktivitas perdagangan dan jasa yang terus berkembang selama satu dekade terakhir. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan menyumbang rata-rata sebesar 13,1 persen, suatu angka yang cukup signifikan mengingat wilayah ini relatif lebih muda secara administratif namun memiliki dinamika pertumbuhan sektor jasa, real estat, dan teknologi informasi yang sangat pesat.

Besarnya kontribusi agregat calon Provinsi Tangerang Raya sebesar 57,9 persen terhadap PDRB Provinsi Banten menjadi argumen ekonomi yang kuat bagi urgensi pembentukan provinsi baru. Ketergantungan fiskal dan struktural Banten yang begitu besar terhadap kawasan ini mengindikasikan adanya ketimpangan kapasitas pengelolaan antara kebutuhan pembangunan yang masif di Tangerang Raya dengan struktur pemerintahan provinsi yang ada saat ini. Dengan terbentuknya Provinsi Tangerang Raya, diharapkan pengelolaan potensi ekonomi yang telah terbukti besar ini dapat dilakukan secara lebih fokus, efisien, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di ketiga wilayah tersebut.



Gambar 2. Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Calon Provinsi Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan) Terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun 2014-2024

Sumber: data diolah peneliti, 2026

Hasil Analisis LQ Sektoral Wilayah Calon Provinsi Tangerang Raya

Hasil rata-rata analisis Location Quotient (LQ) selama periode 2014-2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 2, ketiga wilayah calon Provinsi Tangerang Raya memperlihatkan spesialisasi sektoral yang khas dan saling berbeda satu sama lain. Kota Tangerang menghasilkan empat sektor basis utama. Sektor Transportasi dan Pergudangan mencatat rata-rata LQ tertinggi sebesar 2,29, menjadikannya sektor dengan keunggulan komparatif paling menonjol, ditopang oleh keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai pusat konektivitas nasional. Sektor Informasi dan Komunikasi membentuk basis dengan rata-rata LQ 1,39, mencerminkan tumbuhnya ekosistem digital dan industri berbasis teknologi. Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan melengkapi profil basis Kota Tangerang dengan LQ masing-masing 1,06 dan 1,05, mengonfirmasi karakter kota ini sebagai pusat manufaktur sekaligus pusat aktivitas bisnis modern.

Kabupaten Tangerang menunjukkan profil basis ekonomi yang paling beragam dengan lima sektor basis. Jasa Keuangan mencatat rata-rata LQ tertinggi sebesar 1,68, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,61 yang mencerminkan besarnya kapasitas infrastruktur energi penopang kawasan industri. Konstruksi membentuk basis dengan LQ 1,32, sejalan dengan ekspansi kawasan industri dan perumahan yang masif. Industri Pengolahan, Pertanian, juga teridentifikasi sebagai basis, menggambarkan kabupaten ini sebagai wilayah dengan fondasi ekonomi paling solid dan terdiversifikasi di antara ketiga wilayah. Kota Tangerang Selatan memperlihatkan profil LQ yang paling menonjol dengan sembilan sektor basis, didominasi oleh sektor-sektor jasa modern bernilai tambah tinggi. Jasa Kesehatan mencatat rata-rata LQ 3,22 dan Jasa Perusahaan 3,21 keduanya jauh melampaui ambang basis mencerminkan konsentrasi layanan kesehatan premium dan kantor bisnis modern yang sangat tinggi. Jasa Pendidikan (2,34), Informasi dan Komunikasi (2,76), serta Real Estate (2,12) turut membentuk karakter Kota Tangerang Selatan sebagai kota berbasis pengetahuan dan jasa modern. Konstruksi, Perdagangan, serta Akomodasi dan Makan Minum melengkapi struktur basis wilayah ini. Ketiga wilayah memperlihatkan pola spesialisasi yang komplementer: Kota Tangerang unggul pada industri dan logistik, Kabupaten Tangerang pada manufaktur dan infrastruktur, serta Kota Tangerang Selatan pada jasa modern berbasis pengetahuan. Komplementaritas ini menjadi argumen empiris yang kuat bahwa penggabungan ketiganya dalam satu entitas Provinsi Tangerang Raya akan menghasilkan

struktur ekonomi yang jauh lebih tangguh, terintegrasi, dan berdaya saing tinggi. emuan ini sejalan dengan Teori Basis Ekonomi yang menekankan bahwa keberagaman sektor basis menjadi penjamin ketahanan ekonomi regional terhadap guncangan eksternal. (He et al., 2022)

Tabel 2. Rata-Rata Location Quotient (LQ) Sektoral Wilayah Calon Provinsi Tangerang Raya
(Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan Tahun 2014-2024)

Sektor	Kab Tangerang	Kota Tangerang	Kota Tangsel
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,07	0,27	0,04
B. Pertambangan dan Penggalian	0,07	0	0
C. Industri Pengolahan	1,09	1,06	0,26
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,61	0,17	0,10
E. Pengadaan Air	0,84	0,88	0,49
F. Konstruksi	1,32	0,76	1,37
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,87	0,98	1,23
H. Transportasi dan Pergudangan	0,50	2,29	0,52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,62	0,62	1,21
J. Informasi dan Komunikasi	0,91	1,39	2,76
K. Jasa Keuangan	1,68	0,98	0,43
L. Real Estate	0,97	0,80	2,12
M,N. Jasa Perusahaan	0,93	1,05	3,21
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,83	0,65	0,57
P. Jasa Pendidikan	0,77	0,75	2,34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,36	0,80	3,22
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,95	0,92	1,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 diolah, peneliti

**Analisis Tipologi Klassen Sektoral Wilayah Calon Provinsi Tangerang Raya
2014-2024**

Struktur ekonomi Kabupaten Tangerang selama periode 2014–2024 menunjukkan karakteristik wilayah yang sedang dalam fase transisi ekonomi. Dari 17 sektor yang dianalisis, hanya dua sektor yang masuk Kuadran I (developed sektor), yaitu Konstruksi dan Jasa Keuangan keduanya memiliki share sekaligus pertumbuhan yang melampaui benchmark Provinsi Banten. Dominasi justru berada pada Kuadran III (developing sektor) yang mencakup 11 sektor, di antaranya Perdagangan Besar & Eceran, Transportasi & Pergudangan, Informasi & Komunikasi, serta Jasa Pendidikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut telah memperlihatkan laju pertumbuhan yang kompetitif melampaui Banten, namun kontribusi share-nya terhadap total PDRB daerah masih berada di bawah proporsi rata-rata Banten, sehingga belum sepenuhnya terealisasi sebagai sektor penggerak utama. Tiga sektor yang masuk Kuadran II (stagnan sektor), yakni Pertanian, Industri Pengolahan, dan Pengadaan Listrik & Gas. Ketiganya memiliki share yang lebih besar dari Banten dengan Industri Pengolahan bahkan mendominasi struktur PDRB di angka 37,43% namun laju pertumbuhannya justru di bawah rata-rata Banten, mengindikasikan gejala stagnansi atau tekanan daya saing yang perlu diwaspadai. Satu sektor, Jasa Perusahaan, jatuh ke Kuadran IV (underdeveloped sektor) karena share maupun pertumbuhannya keduanya lebih rendah dari Banten. Secara keseluruhan, Kabupaten Tangerang menyimpan potensi ekonomi yang luas di Kuadran III, namun membutuhkan kebijakan yang lebih terarah untuk mentransformasi sektor-sektor potensial tersebut naik ke Kuadran I, sekaligus merevitalisasi sektor industri pengolahan yang mulai kehilangan momentum pertumbuhannya.

Tabel 3. Analisis Tipologi Klasen Sektoral Kabupaten Tangerang 2014-2024

Sektor	si (%)	s (%)	ski (%)	sk (%)	Δ Share	Δ Tumbuh	Klasifikasi
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	5.90	5.49	2.67	3.24	+0.41	-0.57	KD II
Pertambangan dan Penggalian	0.04	0.60	-0.78	-4.08	-0.56	+3.30	KD III
Industri Pengolahan	37.43	34.60	2.80	3.23	+2.83	-0.43	KD II
Pengadaan Listrik dan Gas	1.62	1.00	-2.86	-0.31	+0.62	-2.55	KD II
Pengadaan Air	0.08	0.10	5.58	5.48	-0.02	+0.10	KD III
Konstruksi	13.17	9.97	6.92	5.91	+3.20	+1.01	KD I
Perdagangan Besar & Eceran	11.70	13.38	4.34	3.96	-1.68	+0.38	KD III
Transportasi & Pergudangan	2.97	6.06	6.94	5.25	-3.09	+1.69	KD III
Akomodasi & Makan Minum	1.54	2.46	6.50	5.99	-0.92	+0.51	KD III
Informasi dan Komunikasi	5.63	6.18	8.18	7.65	-0.55	+0.53	KD III
Jasa Keuangan	4.91	2.92	5.32	4.81	+1.99	+0.51	KD I
Real Estate	8.45	8.73	6.74	5.62	-0.28	+1.12	KD III
Jasa Perusahaan	0.93	1.01	4.95	5.01	-0.08	-0.06	KD IV
Administrasi Pemerintahan	1.45	1.74	6.94	5.05	-0.29	+1.89	KD III
Jasa Pendidikan	2.29	2.98	5.47	4.58	-0.69	+0.89	KD III
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0.46	1.30	8.54	7.16	-0.84	+1.38	KD III
Jasa Lainnya	1.42	1.49	6.24	5.47	-0.07	+0.77	KD III

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 diolah, peneliti

Kota Tangerang memperlihatkan pola tipologi yang lebih terfragmentasi dibandingkan dua wilayah lainnya, dengan distribusi yang relatif merata antara keempat kuadran. Dua sektor yang berhasil menempati Kuadran I adalah Transportasi & Pergudangan dan Informasi & Komunikasi keduanya merupakan cerminan langsung dari keunggulan lokasi Kota Tangerang sebagai simpul konektivitas nasional yang ditopang oleh keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta tumbuhnya ekosistem digital perkotaan. Sementara itu, Industri Pengolahan dan Jasa Perusahaan berada di Kuadran II, di mana kontribusi share keduanya masih cukup signifikan Industri Pengolahan bahkan menyumbang 36,55% dari total PDRB namun pertumbuhannya mulai melambat dan tertinggal dari rata-rata Banten, menjadi sinyal peringatan dini terhadap fenomena deindustrialisasi prematur di kota ini. Kondisi yang perlu mendapat perhatian serius adalah banyaknya sektor yang terperosok ke Kuadran IV (relatif tertinggal), yakni lima sektor: Konstruksi, Perdagangan Besar & Eceran, Akomodasi & Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, dan Jasa Lainnya. Keberadaan Perdagangan di Kuadran IV cukup mengkhawatirkan mengingat sektor ini secara alamiah seharusnya tumbuh pesat di pusat urban sepadat Kota Tangerang. Delapan sektor sisanya menghuni Kuadran III dengan pertumbuhan yang baik namun share yang masih terbatas, mencerminkan potensi yang belum sepenuhnya tergarap. Secara keseluruhan, Kota Tangerang perlu mendiversifikasi strategi pembangunan ekonominya mempertahankan momentum di sektor transportasi dan digital, sekaligus akselerasi sektor-sektor Kuadran III agar dapat bertransisi menjadi motor pertumbuhan baru yang menggantikan industri pengolahan yang mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan.

Tabel 4. Analisis Tipologi Klassen Sektoral Kota Tangerang 2014-2024

Sektor	si (%)	s (%)	ski (%)	sk (%)	Δ Share	Δ Tumbuh	Klasifikasi
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	1.51	5.49	4.80	3.24	-3.98	+1.56	KD III
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.60	0.00	-4.08	-0.60	+4.08	KD III
Industri Pengolahan	36.55	34.60	2.18	3.23	+1.95	-1.05	KD II
Pengadaan Listrik dan Gas	0.17	1.00	2.70	-0.31	-0.83	+3.01	KD III
Pengadaan Air	0.09	0.10	6.74	5.48	-0.01	+1.26	KD III
Konstruksi	7.53	9.97	5.11	5.91	-2.44	-0.80	KD IV
Perdagangan Besar & Eceran	13.22	13.38	3.65	3.96	-0.16	-0.31	KD IV
Transportasi & Pergudangan	14.07	6.06	6.22	5.25	+8.01	+0.97	KD I
Akomodasi & Makan Minum	1.52	2.46	5.18	5.99	-0.94	-0.81	KD IV
Informasi dan Komunikasi	8.64	6.18	7.79	7.65	+2.46	+0.14	KD I
Jasa Keuangan	2.90	2.92	5.05	4.81	-0.02	+0.24	KD III
Real Estate	6.96	8.73	5.79	5.62	-1.77	+0.17	KD III
Jasa Perusahaan	1.05	1.01	4.59	5.01	+0.04	-0.42	KD II
Administrasi Pemerintahan	1.12	1.74	4.94	5.05	-0.62	-0.11	KD IV
Jasa Pendidikan	2.25	2.98	5.07	4.58	-0.73	+0.49	KD III
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.05	1.30	7.86	7.16	-0.25	+0.70	KD III
Jasa Lainnya	1.37	1.49	5.36	5.47	-0.12	-0.11	KD IV

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 diolah, peneliti

Kota Tangerang Selatan adalah wilayah dengan profil tipologi paling dinamis di antara ketiga daerah calon Provinsi Tangerang Raya, yang tercermin dari dominasi Kuadran I yang mencakup delapan sektor sekaligus. Sektor-sektor unggulan tersebut meliputi Konstruksi, Perdagangan Besar & Eceran, Akomodasi & Makan Minum, Informasi & Komunikasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Lainnya suatu komposisi yang secara kolektif menggambarkan karakter kota berbasis jasa modern dan ekonomi pengetahuan yang matang. Fakta bahwa Real Estate memiliki share sebesar 18,47% dan Informasi & Komunikasi mencapai 16,94% keduanya jauh melampaui proporsi rata-rata Banten menegaskan bahwa Kota Tangerang Selatan telah berhasil membangun spesialisasi ekonomi yang khas dan berdaya saing tinggi dalam ekosistem perumahan premium serta industri digital. Satu-satunya sektor yang masuk Kuadran II adalah Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, di mana share-nya yang mencapai 4,21% sudah jauh melampaui Banten, namun laju pertumbuhannya sedikit tertinggal. Kondisi ini bukan semata kelemahan, melainkan dapat diinterpretasikan sebagai indikasi kedewasaan sektor Kota Tangerang Selatan telah memiliki kapasitas layanan kesehatan premium yang sangat padat sehingga ruang ekspansinya lebih terbatas. Dua sektor yang terperosok ke Kuadran IV, yaitu Pertanian dan Industri Pengolahan, sejatinya mencerminkan konsekuensi logis dari transformasi struktural menuju kota jasa dan bukan merupakan kelemahan fundamental. Dengan hanya dua sektor di

Kuadran IV dan enam sektor potensial di Kuadran III, Kota Tangerang Selatan memiliki fondasi ekonomi yang paling solid dan paling siap bertransisi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis jasa di tingkat provinsi baru.

Tabel 5. Analisis Tipologi Klassen Sektoral Kota Tangerang Selatan 2014-2024

Sektor	si (%)	s (%)	ski (%)	sk (%)	Δ Share	Δ Tumbuh	Klasifikasi
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	0.20	5.49	0.46	3.24	-5.29	-2.78	KD IV
Pertambangan dan Penggalan	0.00	0.60	0.00	-4.08	-0.60	+4.08	KD III
Industri Pengolahan	8.84	34.60	1.68	3.23	-25.76	-1.55	KD IV
Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	1.00	5.05	-0.31	-0.90	+5.36	KD III
Pengadaan Air	0.05	0.10	5.58	5.48	-0.05	+0.10	KD III
Konstruksi	13.57	9.97	6.10	5.91	+3.60	+0.19	KD I
Perdagangan Besar & Eceran	16.53	13.38	4.42	3.96	+3.15	+0.46	KD I
Transportasi & Pergudangan	3.02	6.06	6.61	5.25	-3.04	+1.36	KD III
Akomodasi & Makan Minum	2.98	2.46	6.40	5.99	+0.52	+0.41	KD I
Informasi dan Komunikasi	16.94	6.18	7.97	7.65	+10.76	+0.32	KD I
Jasa Keuangan	1.24	2.92	5.94	4.81	-1.68	+1.13	KD III
Real Estate	18.47	8.73	5.98	5.62	+9.74	+0.36	KD I
Jasa Perusahaan	3.24	1.01	5.90	5.01	+2.23	+0.89	KD I
Administrasi Pemerintahan	1.00	1.74	6.96	5.05	-0.74	+1.91	KD III
Jasa Pendidikan	6.93	2.98	5.01	4.58	+3.95	+0.43	KD I
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4.21	1.30	7.06	7.16	+2.91	-0.10	KD II
Jasa Lainnya	2.68	1.49	5.66	5.47	+1.19	+0.19	KD I

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 diolah, peneliti

Calon Provinsi Tangerang Raya secara agregat, memperlihatkan profil tipologi yang paling kuat dan paling terdiversifikasi di antara seluruh unit analisis, dengan 10 sektor berhasil menempati Kuadran I suatu pencapaian yang tidak dimiliki oleh satu pun daerah secara individual. Sektor-sektor unggulan tersebut mencakup Konstruksi, Perdagangan Besar & Eceran, Transportasi & Pergudangan, Informasi & Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan & Sosial, serta Jasa Lainnya sebuah komposisi yang menandakan bahwa penggabungan tiga wilayah ini menghasilkan efek sinergi nyata, di mana kelemahan satu daerah tertutupi oleh kekuatan daerah lainnya. Tidak ada satu pun sektor yang masuk Kuadran II, yang berarti seluruh sektor yang sudah memiliki share besar juga mampu mempertahankan laju pertumbuhan di atas rata-rata Banten sebuah kondisi yang ideal bagi entitas ekonomi yang sedang membangun fondasi kemandirian fiskal. Empat sektor yang menghuni Kuadran III (Pertambangan, Pengadaan Air, Akomodasi & Makan Minum, dan Administrasi Pemerintahan merupakan sektor-sektor dengan pertumbuhan yang kompetitif namun share yang masih terbatas ketiganya menyimpan potensi untuk naik ke Kuadran I dengan kebijakan yang tepat sasaran. Adapun tiga sektor di Kuadran IV Pertanian, Industri Pengolahan, dan Pengadaan Listrik & Gas merupakan refleksi dari transformasi struktural yang sedang berlangsung, di mana basis ekonomi kawasan

perkotaan-metropolitan ini secara alamiah bergeser dari sektor sekunder menuju sektor tersier dan kuartier. Secara keseluruhan, hasil tipologi agregat ini memberikan legitimasi empiris yang kuat bahwa Provinsi Tangerang Raya bukan sekadar konsep administratif, melainkan entitas ekonomi yang secara struktural sudah siap berdiri sendiri dengan mesin pertumbuhan yang beragam, kuat, dan saling melengkapi antar wilayahnya.

Tabel 6. Analisis Tipologi Klassen Sektoral Calon Provinsi Tangerang Raya (Agregat) 2014-2024

Sektor	si (%)	s (%)	ski (%)	sk (%)	Δ Share	Δ Tumbuh	Klasifikasi
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2.82	5.49	3.08	3.24	-2.67	-0.16	KD IV
Pertambangan dan Penggalian	0.01	0.60	-0.78	-4.08	-0.59	+3.30	KD III
Industri Pengolahan	30.63	34.60	2.41	3.23	-3.97	-0.82	KD IV
Pengadaan Listrik dan Gas	0.69	1.00	-2.08	-0.31	-0.31	-1.77	KD IV
Pengadaan Air	0.08	0.10	6.09	5.48	-0.02	+0.61	KD III
Konstruksi	10.96	9.97	6.13	5.91	+0.99	+0.22	KD I
Perdagangan Besar & Eceran	13.40	13.38	4.03	3.96	+0.02	+0.07	KD I
Transportasi & Pergudangan	7.53	6.06	5.73	5.25	+1.47	+0.48	KD I
Akomodasi & Makan Minum	1.86	2.46	5.99	5.99	-0.60	+0.00	KD III
Informasi dan Komunikasi	9.41	6.18	7.89	7.65	+3.23	+0.24	KD I
Jasa Keuangan	3.26	2.92	5.23	4.81	+0.34	+0.42	KD I
Real Estate	10.10	8.73	6.09	5.62	+1.37	+0.47	KD I
Jasa Perusahaan	1.50	1.01	5.25	5.01	+0.49	+0.24	KD I
Administrasi Pemerintahan	1.21	1.74	6.15	5.05	-0.53	+1.10	KD III
Jasa Pendidikan	3.32	2.98	5.09	4.58	+0.34	+0.51	KD I
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1.55	1.30	7.37	7.16	+0.25	+0.21	KD I
Jasa Lainnya	1.68	1.49	5.68	5.47	+0.19	+0.21	KD I

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026 diolah, peneliti

5. SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan dua temuan pokok yang saling menguatkan. Pertama, analisis Location Quotient (LQ) periode 2014-2024 mengonfirmasi bahwa ketiga wilayah calon Provinsi Tangerang Raya memiliki spesialisasi sektoral yang khas dan bersifat komplementer: Kabupaten Tangerang unggul pada sektor Jasa Keuangan, Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Pertanian; Kota Tangerang mendominasi pada sektor Transportasi & Pergudangan, Informasi & Komunikasi, Industri Pengolahan, dan Jasa Perusahaan; sementara Kota Tangerang Selatan mencatat keunggulan komparatif tertinggi pada sembilan sektor berbasis jasa modern, termasuk Jasa Kesehatan (LQ 3,22), Jasa Perusahaan (LQ 3,21), Informasi & Komunikasi (LQ 2,76), dan Jasa Pendidikan (LQ 2,34).

Kedua, analisis Tipologi Klassen sektoral mengungkapkan bahwa secara agregat Tangerang Raya menempatkan 10 dari 17 sektor pada Kuadran I (maju dan tumbuh pesat), tanpa satu pun sektor yang masuk Kuadran II, sebuah profil yang tidak dimiliki oleh satu pun daerah secara individual. Kondisi ini membuktikan bahwa sinergi antar ketiga wilayah menghasilkan efek komplementaritas struktural yang nyata, di mana kelemahan satu daerah secara sistematis ditutupi oleh kekuatan daerah lainnya.

Berdasarkan kedua temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan Provinsi Tangerang Raya memiliki landasan ekonomi yang kuat dan layak secara empiris. Kontribusi agregat sebesar 57,9 persen terhadap PDRB Provinsi Banten, dipadukan dengan struktur sektoral yang terdiversifikasi, basis jasa modern yang kompetitif, serta pola pertumbuhan yang secara konsisten melampaui Provinsi Banten sepanjang dekade terakhir, menegaskan bahwa Tangerang Raya bukan sekadar wacana administratif melainkan entitas ekonomi yang telah memiliki kematangan struktural untuk berdiri mandiri. Meski demikian, beberapa sektor di Kuadran III terutama di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang membutuhkan akselerasi kebijakan agar dapat bertransisi ke Kuadran I, sementara kecenderungan deindustrialisasi di Kota Tangerang perlu diantisipasi melalui strategi reindustrialisasi berbasis teknologi tinggi.

Penelitian ini tentu masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Analisis LQ dan Tipologi Klassen yang digunakan memberikan gambaran struktur dan daya saing sektoral yang kuat, namun belum mengikut sertakan dimensi fiskal seperti kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang tentunya akan melengkapi gambaran kesiapan Tangerang Raya. Penggunaan satu basis data PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) secara konsisten sepanjang periode pengamatan dipilih untuk menjaga keseragaman dan komparabilitas data, sekalipun kombinasi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berpotensi memperkaya analisis pada penelitian mendatang. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi analisis ini dengan variabel fiskal seperti kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan proyeksi kemandirian fiskal, guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kesiapan Provinsi Tangerang Raya sebagai daerah otonom baru yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A., Gantowati, E., Winarna, J., Khairudin, K., & Redaputri, A. P. (2021). Implementation of the Effectiveness of Regional Autonomy in Indonesia. *Jejak*. <https://doi.org/10.15294/jejak.v14i1.26811>
- Amir, H., & Nazara, S. (2005). Analisis Perubahan Struktur Ekonomi (Economic Landscape) Dan Kebijakan Strategi Pembangunan Jawa Timur Tahun 1994 Dan 2000: Analisis Input-Output. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*. <https://doi.org/10.21002/jepi.v5i2.122>
- Ciptawaty, U. (2019). Pola Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otonomi Baru (DOB) Berdasarkan Tipologi Klassen di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 136–143.
- Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.789>
- Faisal, F., Rachman, I. C., Elvina, E., Wahab, Z. W. A., & Anwar, A. (2023). PEMETAAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KOTA BANDA ACEH DENGAN METODE TIPOLOGY KLASSEN DAN LOCATION QUOTIENT. *Ekonis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1).
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity Dan Diversity. *Pledoi*. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.26>
- Haryanto, J. T. (2017). Analisis Perbandingan Peta Kemampuan Keuangan Daerah Penghasil Sda Dan Non-Sda Di Era Desentralisasi Fiskal Studi Kasus: Penggunaan Metode Kuadran. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.821>
- He, D., Miao, P., & Qureshi, N. A. (2022). Can industrial diversification help strengthen regional

- economic resilience? *Frontiers in Environmental Science*, 10, 987396.
- Irasriadipura, I., Rahayu, S., & Junaidi, J. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhanekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16267>
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh Pdrb, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Isoquant Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252>
- Lidya Thalia.S. (2025). *Pemekaran Banten: Tangerang Raya Diproyeksi Jadi Provinsi Berkekuatan Ekonomi Besar*. Tvtrineews.Com. <https://nasional.tvtrineews.com/berita/tzzcsv0-pemekaran-banten-tangerang-raya-diproyeksi-jadi-provinsi-berkekuatan-ekonomi-besar>
- Mashita, J., & Anggresta, V. (2022). Dampak Inflasi, Ihk, Ipm, Nilai Produksi, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Umkm Di Kota Semarang. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawailmiah.v2i3.4030>
- Mathur, V. K. (1999). Human Capital-Based Strategy for Regional Economic Development. *Economic Development Quarterly*. <https://doi.org/10.1177/089124249901300301>
- Meliala, F. C. D. (2022). Koalisi Teritorial untuk Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia Pasca Reformasi: Kegagalan Pembentukan Provinsi Luwu Raya 1999-2014. *Jurnal Review Politik*, 12(2), 211–228.
- Mulyasari, A. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Angkatan Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Economics Development Analysis Journal*. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22174>
- Natsir, M. K. K. (2025). Analisis otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3(1), 141–162.
- Nijkamp, P., & Abreu, M. (2009). *Regional Development Theory*. <https://doi.org/10.1016/b978-008044910-4.00869-5>
- Nishiyama, Y. (1997). Exports' Contribution to Economic Growth: Empirical Evidence for California, Massachusetts, and Texas, Using Employment Data. *Journal of Regional Science*. <https://doi.org/10.1111/0022-4146.00045>
- Prohansah, S. D., & Eprilianto, D. F. (2022). Upaya Optimalisasi Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan Menggunakan Prinsip Dasar Manajemen. *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1293-1304>
- Rizkika, C., Salman, S., & Kusaimah, K. (2023). Efektivitas Pembentukan Daerah Otonom Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SEMBILAN: Jurnal Hukum Dan Adat*, 1(1), 13–23.
- Rutland, T., & O'Hagan, S. (2007). The Growing Localness of the Canadian City, Or, on the Continued (Ir)relevance of Economic Base Theory. *Local Economy the Journal of the Local Economy Policy Unit*. <https://doi.org/10.1080/02690940701416727>
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan Desentralisasi Dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.198>
- Sausan, A., Cahyani, A., Ashidieq, F., Risqa, M., Bahri, M., Wahyudi, R., Gitanto, V., & Putri, R. (2022). *Location Quotient Analysis of the Agricultural Sector in Yogyakarta, Indonesia: 2nd International Conference on Smart and Innovative Agriculture (ICoSIA 2021), Yogyakarta, Indonesia*.
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.131>
- Supriyo, D. A. & others. (2021). Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota. *Wijayakusuma Law Review*, 3(2), 1–5.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Tang, R., Tang, T., & Lee, Z. (2014). The Efficiency of Provincial Governments in China From 2001 to 2010: Measurement and Analysis. *Journal of Public Affairs*. <https://doi.org/10.1002/pa.1518>
- Tinanto, B., Irawati, I., & Valentina, T. R. (2023). Vertical Conflict on Regional Autonomy Between the Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ), Volume 9, Nomor 2, 2026. CC-BY-SA 4.0 License

-
- Regent of the Meranti Islands and the Governor of Riau and the Ministry of Finance. *Aristo*. <https://doi.org/10.24269/ars.v12i2.6665>
- Vikaliana, R. (2018). Analisis Identifikasi Sektor Perekonomian Sebagai Sektor Basis Dan Sektor Potensial Di Kota Bogor. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i2.24>
- Widiprana, R. B. (2022). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. *Lensa Ekonomi*, 16(02), 200–213.
- Widodo, A. H., Sujianto, A. E., & Subhan, S. (2024). Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Daerah. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1518>
- Yudia, R. N., Nurcahya, Y. A., & Atika, A. (2024). Analisis Pertumbuhan Penerimaan PAD Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Magelang. *Jeae*. <https://doi.org/10.47134/jeae.v1i3.189>